



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

---

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 14 (Empat Belas)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Ketenagakerjaan RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 7 Februari 2018
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan RI terkait <i>blue print</i> Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas dalam mengantisipasi persaingan dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk bersama Investor Asing;</li><li>2. Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan RI terkait Perkembangan penyelesaian kasus ledakan pabrik petasan PT. Panca Buana Cahaya Sukses, Kosambi, Tangerang;</li><li>3. Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan RI terkait Moratorium Terbatas Penempatan TKI ke Luar Negeri dan Perpanjangan <i>MoU</i> Penempatan yang telah habis masa berlakunya;</li><li>4. Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan RI terkait sinergitas penyelenggaraan vokasi di sektor Industri Manufaktur dalam memenuhi 1,1 juta lapangan kerja baru Tahun 2018.</li></ol>
Ketua Rapat	: H. Syamsul Bachri S., M.Sc/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, S.H.,/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Hadir	: A. 26 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI B. Menteri Ketenagakerjaan RI beserta jajarannya.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan dibuka pukul 14.50 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasional (vocational training) dan mengoptimalkan fungsi BLK untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional sehingga peluang kerja dalam negeri dipenuhi dan tidak dipenuhi oleh pekerja asing.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mempercepat pencapaian target perluasan kesempatan kerja baru sesuai dengan kebutuhan 30 persen industri manufacture dan memenuhi 70 persen kebutuhan 3 juta lapangan kerja baru pada tahun 2018.
3. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mengambil kebijakan dalam mendorong peningkatan keahlian pekerja sesuai kebutuhan ketenagakerjaan di era digital termasuk menyiapkan payung hukum dalam memenuhi hak-hak normatif pekerja sektor digital, baik didalam maupun diluar negeri yang belum terjangkau guna mengantisipasi perselisihan hubungan industrial dimasa yang akan datang.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuat kebijakan perlindungan pekerja seni dan film yang akan bekerja ke luar negeri maupun pengaturan pekerja seni dan film asing yang masuk ke Indonesia.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan tetap mempertahankan kebijakan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah sebelum penguasaan bahasa asing bagi calon pekerja migran terpenuhi, penempatan atase ketenagakerjaan selesai dan seluruh ketentuan peraturan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diterbitkan.
6. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX yang disampaikan pada rapat kerja hari ini, 7 Februari 2018 disampaikan paling lambat 5 Maret 2018.

**Rapat diakhiri pukul 18.10 WIB**

**Ketua Rapat/  
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,**

  
**H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc**

**A-312**